

# PERJANJIAN KINERJA

## TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Prof. DR. Ir. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng**

Jabatan : Pj. Walikota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Pj. Walikota Makassar

**Prof. DR. Ir. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng**

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Makassar

**TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90 %
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat Perangkat Daerah	65 %
		Persentase Indikator Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (PPRG) yang terpenuhi pada tingkat Perangkat Daerah	65 %
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1 : 110
		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	200 Kasus
		Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	400 Kasus
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA	Jumlah perempuan kepala rumah tangga miskin yang mendapat pemberdayaan	100 Orang

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	
5	Meningkatnya peran Perangkat Daerah dalam penyediaan data gender dan anak	Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia	65,00 %
		Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia	94,48 %
		Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	78,32 %
6.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Cakupan hak-hak anak yang terpenuhi	85,00 %
		Persentase Kelurahan Ramah Anak	85,00 %
7.	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	150 Kasus
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	200 Kasus
		Cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan	100 Kasus

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.842.220.705
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.540.130.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 3.179.298.720
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 76.752.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 335.835.000
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 740.496.800
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 588.641.775
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 13.303.375.000</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Pj. Walikota Makassar



Prof. DR. Ir. RUDY DJAMALUDDIN, M.Eng

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Makassar



TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

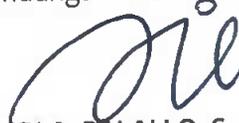
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

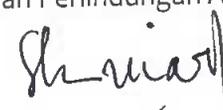
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar

  
**TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si**

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

  
**Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

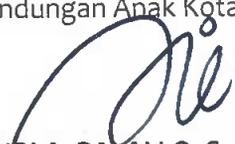
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%

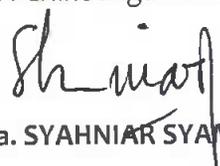
No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.842.220.705,-

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar

  
TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

  
Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RISAL**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

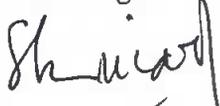
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

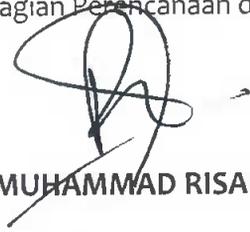
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2020

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

  
**Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

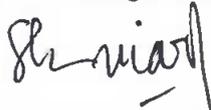
  
**MUHAMMAD RISAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

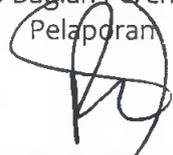
No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan SKPD	3 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan RKA-SKPD	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perubahan RKA-SKPD	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan DPA-SKPD	1 Dok
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja, LKIP	2 Dok.
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Dokumen Lakip dan Renja	3 Dok

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 60.745.000,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 15.789.065,-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 12.241.000,-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 19.276.000,-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.049.000,-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 25.914.000,-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.534.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 169.548.065,-</b>

Pihak Kedua,  
 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  
**Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

Makassar, Januari 2021  
 Pihak Pertama,  
 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

  
**MUHAMMAD RISAL**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHAMNI HASAN, SH, MH.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

**Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Keuangan

**NURHAMNI, SH, MH**

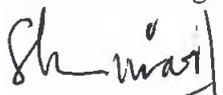
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	1 Tahun
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	12 Orang
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	6 Dok

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.902.771.000,-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 236.160.000,-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 7.159.000,-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 16.060.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 5.162.150.000,-</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 dan Perlindungan Anak



**Dra. SYAHNIAR SYAM, M.Si**

Pihak Pertama,  
 Kepala Sub Bagian Keuangan



**NURHAMNI, SH, MH.**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. TARBIANY, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

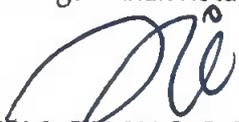
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar

  
TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

  
HJ. TARBIANY, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	20,00 %
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	5,51 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 1.540.130.000,-
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 76.752.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.616.882.000,-</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak Kota Makassar



TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
 Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan



H.J. TARBIANY, SE



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI DEWI RATNA SARI, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HJ. TARBIANY, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

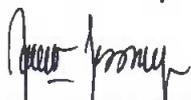
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

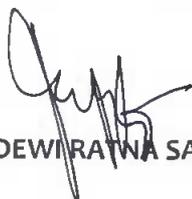
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

  
HJ. TARBIANY, SE

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

  
ANDI DEWI RATNA SARI, S.Sos

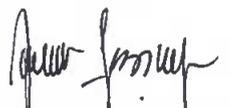
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	1.725 Orang

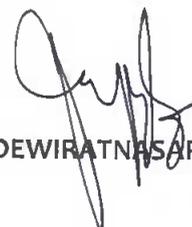
No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp. 1.185.585.000,-

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

  
HJ. TARBIANY, SE

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

  
ANDI DEWIRATNASARI, S.Sos



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. ANDI FITADIANA, MM**  
Jabatan : Kepala Seksi Pengarustamaan Gender

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HJ. TARBIANY, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

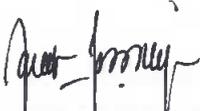
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

  
**HJ. TARBIANY, SE**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengarustamaan Gender

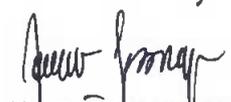
  
**Dra. ANDI FITADIANA, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

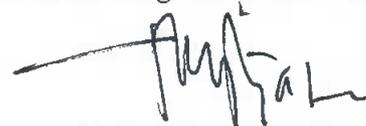
No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan	2 Keg.
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	260 Orang
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	120 Orang

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp. 79.276.000,-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 86.036.000,-
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp. 58.489.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 223.801.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

  
HJ. TARBIANY, SE

Makassar, Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengarustamaan Gender

  
Dra. ANDI FITADIANA, MM



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. M. HATTA**

Jabatan : Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HJ. TARBIANY, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

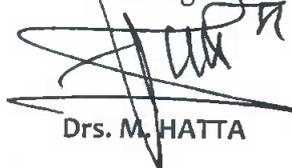
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

  
**HJ. TARBIANY, SE**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas  
Keluarga

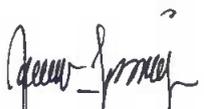
  
**Drs. M. HATTA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	1 Tahun

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 76.752.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

  
HJ TARBIANYI, SE

Makassar, Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga

  
Drs. M. HATTA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

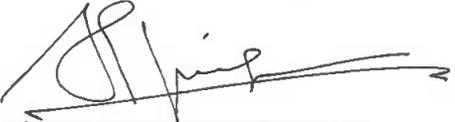
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar

  
**TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si**

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

  
**Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	88,04

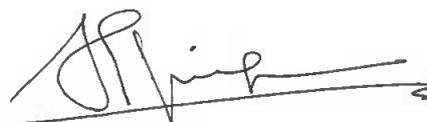
No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 3.179.298.720,-

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar

  
TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

  
Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TINABA KILALA MANGIWA, S.P**  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

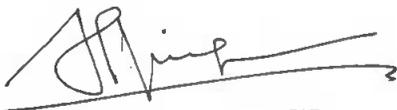
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

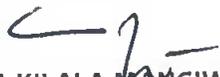
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

  
**Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan

  
**TINABA KILALA MANGIWA, S.P**

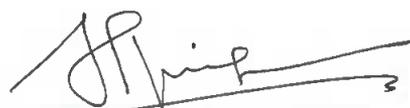
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kota Makassar yang disediakan	1 Tahun
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang mendapat penguatan	225 Orang

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 325.964.520
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 145.572.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 471.536.520</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

  
HJ. HAPIDAH DJALANTE, SIP

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan

  
TINABA KILALA MANGIWA, S.P



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEGAWATI HATIBE, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

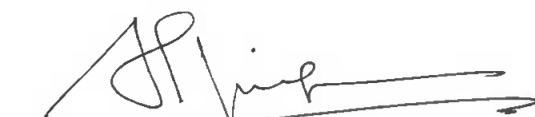
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

  
**Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan  
Perlindungan Perempuan dan Anak

  
**MEGAWATI HATIBE, SE, M.Si**

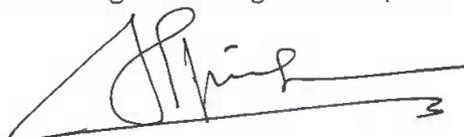
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kota Makassar yang disediakan	1 Tahun
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	150 Orang

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.236.092.200
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 54.372.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.290.464.200</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan



**Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan  
Perlindungan Perempuan dan Anak



**MEGAWATI HATIBE, SE, M.Si**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. ANDI ERLIANA, M.Hum**

Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

**Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan  
Perempuan

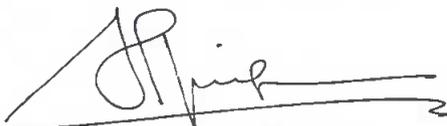
**Dra. Hj. ANDI ERLIANA, M.Hum**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kota Makassar yang dilaksanakan	1.200 Orang
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kota Makassar yang dilaksanakan	1 Tahun
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kota Makassar yang mendapat peningkatan kapasitas	600 Orang

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 791.953.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 230.825.000
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 394.520.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 1.417.928.000</b>

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan

  
Hj. HAPIDAH DJALANTE, SIP

Makassar, Januari 2021  
Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan

  
Dra. Hj. ANDI ERLIANA, M.Hum



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

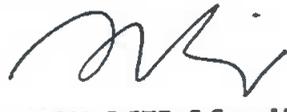
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar

  
**TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si**

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
Perlindungan Anak

  
**ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Ramah Anak	30%
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	96,20%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 740.496.800,-
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 588.641.775,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.329.138.575,-</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak Kota Makassar



TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
 Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
 Perlindungan Anak



ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FARIDA S. ST**

Jabatan : Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
Perlindungan Anak

**ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dalam  
Pemenuhan Hak Anak

**FARIDA S. ST**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kota Makassar yang dikembangkan	1.125 Orang
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kota Makassar yang dikembangkan	1 Tahun

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 524.741.800
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 71.978.040
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 596.719.840</b>

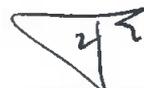
Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
Perlindungan Anak



**ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dalam  
Pemenuhan Hak Anak



**FARIDA S. ST**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHRIAH, SH**  
Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
Perlindungan Anak

**ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

**SUHRIAH, SH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	150 Orang
2	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota Makassar yang disediakan	350 Orang

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 51.378.000,-
2	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 112.539.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 163.917.000,-</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
Perlindungan Anak

  
ACHI SOLEMAN, S.STP, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

  
SUHRIAH, SH



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. SULFIANI KARIM , M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TENRI A. PALALLO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Makassar

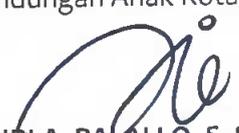
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar

  
TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Data dan Informasi

  
Dra. SULFIANI KARIM , M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia	78,57%
		Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia	94,47%
		Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	78,32%

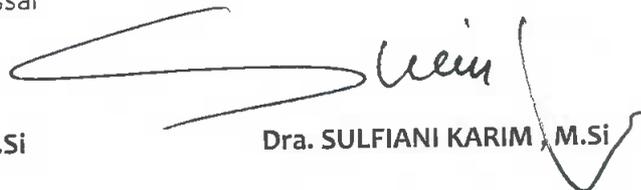
No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 335.835.000,-

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak Kota Makassar

  
 TENRI A. PALALLO, S. Sos, M.Si

Pihak Pertama,  
 Kepala Bidang Data dan Informasi

  
 Dra. SULFIANI KARIM, M.Si



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NANIN SUDIAR, AP**

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SULFIANI KARIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

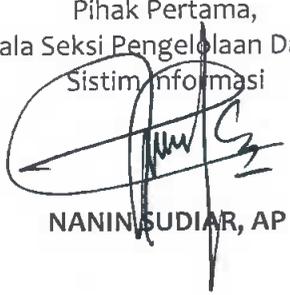
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Data dan Informasi

  
Dra. SULFIANI KARIM, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengelolaan Data dan  
Sistem Informasi

  
NANIN SUDIAR, AP

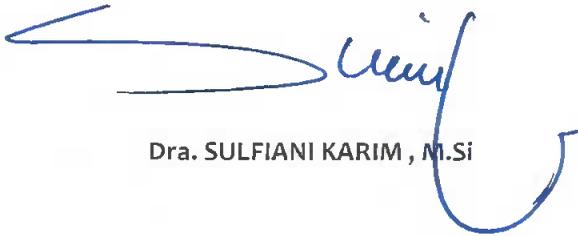
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kewenangan Kota Makassar yang disediakan	1 Buku

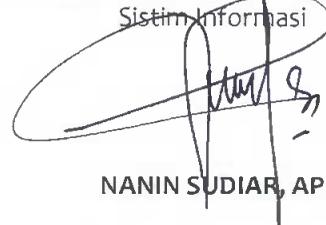
No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 240.578.000,-

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Data dan Informasi

  
Dra. SULFIANI KARIM, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pengelolaan Data dan  
Sistem Informasi

  
NANIN SUDIAR, AP



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. RAHMAH, SH, MM**

Jabatan : Kepala Seksi Analisis dan Penyediaan Data

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SULFIANI KARIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

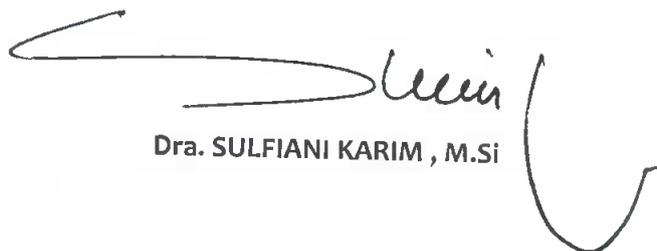
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Data dan Informasi

  
Dra. SULFIANI KARIM, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Analisis dan Penyediaan Data

  
A. RAHMAH, SH, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kota Makassar yang disajikan dan dimanfaatkan	100 Buku
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang dikembangkan	150 Orang

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	95.257.000,-
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	130.744.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>226.001.000,-</b>

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Data dan Informasi

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Analisis dan Penyediaan Data

**Dra. SULFIANI KARIM, M.Si**

  
**A. RAHMAH, SH, MM**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ST. HALIJAH HANAFI, SH**  
Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SULFIANI KARIM, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

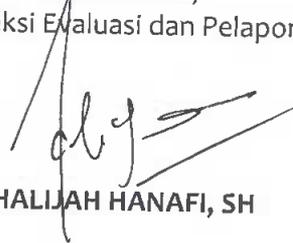
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Data dan Informasi

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

  
Dra. SULFIANI KARIM, M.Si

  
ST. HALIJAH HANAFI, SH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan	150 Orang

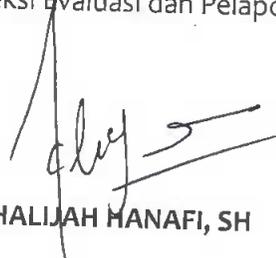
No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 99.637.775,-

Makassar, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Data dan Informasi

  
Dra. SULFIANI KARIM , M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

  
ST. HALIJAH HANAFI, SH